

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi pada SDN Buaranjati 1 Kabupaten Tangerang)

Rizal Fatli Maulana¹, Hardjito S Darmojo², Athar Ismail Muzakir³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: hardjito.darmojo@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada SDN Buaranjati 1). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan guna menyelesaikan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Edward III yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pengembangan yang berfokus pada indikator komunikasi (*transmisi, clarity, consistency*), sumber daya (Sumber daya manusia, anggaran operasional, fasilitas, Otoritas), disposisi (komitmen dan tanggung jawab) serta struktur birokrasi (Prosedur dan tatanan birokrasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sub indikator pertama komunikasi yakni *transmisi* belum optimal sedangkan pada sub indikator *clarity* telah berjalan dengan baik dan *consistency* belum berjalan dengan optimal, pada sub indikator kedua sumber daya yakni sumber daya manusia, anggaran operasional dan fasilitas masih belum maksimal sepenuhnya sedangkan pada otoritas telah berjalan dengan baik, pada sub indikator ketiga disposisi yakni komitmen dan tanggungjawab telah berjalan dengan efektif, dan yang terakhir terkait dengan struktur birokrasi di aspek prosedur telah berjalan dengan baik sedangkan di aspek tatanan hierarki belum baik. Adapun faktor pendukung yakni adanya sosialisasi yang optimal dari pihak sekolah, adanya koordinasi yang mumpuni antara komite dengan pihak sekolah dan adanya dukungan yang optimal oleh guru melalui kemampuan, pikiran, dan motivasinya dalam membangun kualitas pendidikan. Sedangkan dari faktor penghambat yakni perubahan juknis setiap tahun, keterlambatan pelaporan dana BOS, dan dismilaritas antar perencanaan dan realisasi anggaran.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of school operational assistance fund management policies (a study at SDN Buaranjati 1). This study employed a qualitative approach. Data collection techniques included observation, documentation, and interviews with informants to complete the research. The theory used in this study is Edward III's theory related to policy implementation and development, focusing on communication indicators (*transmission, clarity, consistency*), resources (*human resources, operational budget, facilities, authority*), disposition (*commitment and responsibility*), and bureaucratic structure (*procedures and bureaucratic order*). The results of this study indicate that in the first sub-indicator, communication, namely *transmission*, is not optimal, while in the *clarity* sub-indicator, it has been running well and *consistency* has not been optimal. In the second sub-indicator, resources, namely human resources,

operational budget, and facilities, are still not fully maximized, while authority has been running well. In the third sub-indicator, disposition, namely commitment and responsibility, has been running effectively. Finally, regarding the bureaucratic structure, procedures have been running well, while hierarchical order has not been optimal. Supporting factors include optimal outreach from the school, effective coordination between the committee and the school, and optimal support from teachers through their skills, insights, and motivation in improving educational quality. Inhibiting factors include annual changes in technical guidelines, delays in reporting BOS funds, and disparities between budget planning and realization.

Keywords: Implementation, Policy, Management

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki suatu norma atau aturan yang didalamnya terdapat peran vital bagi kehidupan manusia yang intinya sebagai pengembangan ataupun peningkatan mutu yang dilakukan seoptimal mungkin sebagai langkah peningkatan sumber daya manusia (SDM). Konseptualisasi dalam pendidikan diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang dijelaskan terkait sistem pendidikan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi bahwa Pendidikan itu didefinisikan sebagai cara atau usaha yang terencana dan sadar sebagai fungsi terwujudnya proses belajar dan keadaan belajar manusia guna mendorong siswa aktif dalam membentuk perkembangannya juga menggali suatu potensi dalam diri siswa guna memiliki pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, keagamaan, maupun akhlak dan kompetensi keterampilan dalam hidup didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem pendidikan nasional diupayakan sebagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam terwujudnya cita-cita bangsa. Berkaitan dengan pendidikan itu artinya bahwa suatu pendidikan harus terus diupayakan bagaimanapun caranya melalui rancangan aturan yang telah diciptakan oleh pemerintah agar sumber daya manusia di Indonesia ini tidak tertinggal dan dapat terus berkembang seperti apa yang diharapkan Bersama.

Peningkatan kualitas mutu pada sumber daya manusia tentunya sangat ketergantungan dengan pendidikan yang artinya pendidikan terus dikembangkan agar lebih baik lagi. Mulai dari sekolah negeri atau swasta yang terus berlomba dalam mengembangkan pendidikannya dengan kebijakan-kebijakan dasar mereka tentunya menjadikan pendidikan itu dinilai perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Keadaan ini memaksa perlunya pengembangan kebijakan yang lebih baik lagi dan diperhatikan sesuai keadaan Indonesia saat ini yang dinilai masih meremehkan pendidikan yang akhirnya menjadi suatu permasalahan di sekolah-sekolah yaitu para guru yang memiliki tugas mendewasakan dan mengembangkan pemikiran mereka para pelajar agar lebih berkembang dan sesuai pada kaidah atau norma yang berlaku. Pada fenomena yang terjadi ini pemerintah memiliki kewajiban dalam mengembangkan sarana-prasarana yang memadai untuk meningkatkan pendidikan sehingga para pelajar juga memiliki semangat diri dalam belajar yang nantinya mampu memotivasi mereka untuk terus berkembang seperti apa yang diharapkan dalam membangun sumber daya manusia secara terencana dan lebih baik sesuai pada tujuan sistem pendidikan nasional (Firmansyah et al., 2024).

Saat ini Indonesia juga tengah mengalami krisis pada pendidikan yang tidak dapat dipungkiri beragam polemiknya atau persoalannya yakni sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana pendidikan, banyak daerah yang masih tertinggal pada fasilitas pendidikannya dan menyebabkan krisis pada sektor pendidikan,
2. Kompetensi tenaga pendidik yang bermacam-macam, guru memegang peranan penting didalam peningkatan sektor pendidikan namun masih banyak juga sekolah-sekolah yang didalamnya tidak memiliki guru yang cukup pada kompetensinya,
3. Sarana/prasarana pada sekolah yang kurang baik, sarpras menjadi acuan penting dalam memberikan kenyamanan pada belajar-mengajar yang dimana dinilai vital untuk mendukung proses belajar para murid namun pada faktanya fasilitas tersebut masih belum diperhatikan dengan bijak dan baik oleh pemerintah,
4. Kurikulum yang tidak tepat, permasalahan pada kurikulum dari dulu selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung usai dikarenakan banyak sistem pendidikan Indonesia ini kurang bersaing dan tidak memadai pada pengembangan para murid.

Fenomena tersebut menjadi sebuah persoalan bagi tenaga pendidik yang merasakan kesulitan dalam mengembangkan potensi para siswa yang dinyatakan lebih penting lulusnya daripada meninjau potensi siswa dan yang tidak kalah mencolok juga banyak para siswa yang lulus dengan potensi yang kurang baik dari segi kemampuan di tingkat SMP/SMA dan mayoritas banyak yang belum mampu membaca dengan baik karena adanya kurikulum Merdeka tersebut.

Pemerintah dalam menanggapi hal tersebut telah membuat suatu kebijakan yang dinamakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebelumnya dana BOS itu memang sudah ada namun menanggapi isu-isu yang beredar atas permasalahan tersebut dana BOS ini mengalami perubahan setiap tahun khususnya pada Juknis Pengelolaan dana BOS tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini tujuannya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang dananya berasal dari APBN.

Konseptualisasi dari implementasi atau pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dan Permendikbud 63 Tahun 2023 Tentang Juknis BOS Reguler sekolah yang dimana menjadi suatu peraturan terbaru dan dikukuhkan sebagai Juknis BOS pada Tahun 2024 telah mengatur terkait pengelolaan atau penyaluran dana BOS yang saat ini disebut sebagai BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) yang termaktub pada keputusan dari Pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan tersebut memuat tentang pengelolaan dana BOS di sekolah baik dari SD-SMA sebagai fungsi pembiayaan non fisik untuk anggaran non personalia yang mengatur manajemen dalam program pendidikan yang harus dipatuhi oleh pihak sekolah yang nantinya pengelolaan tersebut dijalankan oleh pihak sekolah yang secara admnistrasinya dilakukan penginputan datanya oleh Bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah, mengacu kepada pendapat George Edward III menyatakan bahwa terlaksananya implementasi dapat optimal jika didukung oleh empat faktor, sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi juga dapat diartikan segala sesuatu untuk menyalurkan atau mendistribusikan segala informasi/data yang disampaikan melalui dua orang atau lebih dengan cara-cara yang dinamis yang bertujuan orang atau target yang diajak dalam komunikasi tersebut dapat memahami informasi yang disampaikan. Komunikasi di suatu pelaksanaan kebijakan melingkupi berbagai elemen vital/dasar yakni sebagai berikut: Pertama, Transmutasi informasi (*transmisi*), kedua kejelasan suatu informasi (*clarity*) dan terakhir kemantapan komunikasi (*consistency*).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya mempunyai artian peran vital dalam konteks implementasi kebijakan. Edward III dalam Pramono (2024) menjelaskan bahwa bagaimanapun jelas dan kemantapan pada aturan-aturan dan bagaimanapun akuratnya apa yang disampaikan pada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, bila para aktor kebijakan yang perlunya memiliki sifat tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tidak adanya sumber-sumber daya guna pelaksanaan kebijakan secara maksimal maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Sumber daya yang dimaksud berkenaan dengan apa saja sumber yang dapat dipakai sebagai fungsi sokongan atas berhasilnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi diartikan sebagai suatu kecenderungan pada perbuatan atau ciri-ciri dari pelaksana kebijakan yang memiliki tugas penting guna menjalankan implementasi kebijakan yang optimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama apa yang diharapkan atau target/sasarannya. Karakter penting yang wajib dimiliki oleh aktor kebijakan contohnya seperti sifat jujur dan integritas/komitmen yang tinggi. Sifat jujur mengarahkan para aktor untuk selalu berada dalam pada program yang telah ditetapkan, Sedangkan sifat komitmen yang tinggi dari aktor kebijakan akan membuat mereka selalu pada jalur semangat dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah dikukuhkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Tatanan/sistem birokrasi memiliki kausalitas yang substansial pada implementasi kebijakan. Indikator struktur birokrasi ini mencakup pada dua sisi penting yakni prosedur/sistem serta tatanan birokrasi itu sendiri. Indikator pertama ialah prosedur, dalam pelaksanaan kebijakan lazimnya telah dibuatkan suatu *standar operation procedure* (SOP). SOP ini menjadi acua oleh setiap aktor/implementor/pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan guna dalam menjalankan kebijakan tidak sembarangan dari tujuan serta target/sasaran kebijakan. Indikator kedua adalah Tatanan/sistem birokrasi, sistem birokrasi yang melebar/berliku-liku dan terpecah-belah akan cenderung melemahkan pada aspek pengawasan yang akhirnya menjadi sebab prosedur/tatanan birokrasi yang sulit

dan membingungkan yang kemudian dapat menyebabkan kegiatan organisasi menjadi tidak luwes.

Adanya dana BOS perlu direnungkan secara seksama dengan adanya bantuan pemerintah ini yang menjadi fokus utama yaitu dalam mendukung kegiatan operasional sekolah. Hal ini menjadi suatu kebijakan yang perlu juga diawasi dikarenakan banyak isu-isu yang beredar terkait penyelewengan dana BOS yang pengelolaannya tidak tepat sasaran dalam artian masih adanya penyelewengan atas kebijakan dana BOS tersebut. Penyelewengan dana BOS ini juga dikarenakan kurangnya pengawasan aktif pada otoritas yang dinilai memiliki tugas mengawasi, kurangnya partisipasi masyarakat yang dinilai lemah yang akhirnya terjadinya kecurangan-kecurangan dan tidak tepat sasaran dana BOS itu diberikan kepada sesuatu yang mesti diberikan dan ini menjadi suatu kendala dan permasalahan yang sangat perlu diperhatikan. Oleh karenanya pemerintah dalam tiap sekolah memberikan tugas kepada tiap sekolah dalam membentuk suatu tatanan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai fungsi dana BOS yang diberikan itu sesuai pada rancangan kebijakan yang disusun dan demi terpantaunya juga aliran dana BOS yang diberikan.

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dibuat dan disusun oleh tiap sekolah dimana bendahara BOS bertanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan disekolah. Bendahara BOS tentunya ditunjuk oleh kepala sekolah memiliki fungsi sebagai penyusun untuk terus memberikan info update mengenai dana BOS yang nantinya dilaporkan kepada otoritas terkait dan berwenang agar dipantau sehingga mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan terkait aliran dana BOS. Didalam penyusunan RKAS setiap sekolah perlu melampirkan tagihan-tagihan yang keluar tiap sekolah yang nantinya tagihan tersebut pembayarannya menggunakan SIPLah sebagai laporan yang sesuai untuk dilaporkan kepada Pemerintah sebagai bukti pembayaran yang sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan oleh sekolah khususnya sekolah penerima dana BOS sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa program dana BOS ini masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan sekolah, BOS ini tidak sepenuhnya mendanai seluruh kegiatan sekolah, dana BOS sering mengalami keterlambatan pencairan dikarenakan pemahaman dan minimnya waktu bendahara BOS didalam mengelola anggaran dikarenakan keterbatasan waktu Bendahara BOS didalam pengelolaan dan pendataannya. Permasalahan lain yakni Bendahara Sekolah yang merangkap sekaligus Bendahara BOS pada sekolah ini juga harus mengajar para siswa yang akhirnya seringkali menyebabkan pelaporan BOS terlambat sehingga sekolah tertunda mengembangkan kebutuhan siswa. Atas kejadian tersebut dinilai perlu dilakukan perbaikan guna pengelolaan BOS ini efektif.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi pada implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Buaranjati 1?
2. Bagaimana peran sumber daya pada implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Buaranjati 1?
3. Bagaimana peran disposisi pada implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Buaranjati 1?
4. Bagaimana struktur birokrasi pada implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Buaranjati 1?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan Teknik analisis pengamatan langsung atas suatu permasalahan yang ada dilapangan dan lebih cocok diteliti memakai cara pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode atau proses dalam penelitian yang menggambarkan atau menunjukkan suatu deskripsi baik dari manusia atau orang maupun sikap dan perilaku dalam bentuk tulisan atau lisan. Penelitian kualitatif dipilih karena data-data yang digunakan peneliti dianalisis yang isinya berdasarkan deskripsi dan analisis kasus atas apa yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian ini cocok untuk digunakan dalam mendalami persoalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada SDN Buaranjati).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

- a. Transmisi atau saluran komunikasi masih belum optimal dikarenakan ada koordinasi yang terhambat dari sebagian masyarakat yang masih apatis dalam kegiatan atau partisipasi terhadap pengelolaan dana BOS, hal itu terlihat dari masih adanya masyarakat yang jarang hadir atau tidak ikut serta maupun ikut andil dalam mengawasi pengelolaan dana BOS sehingga transmisi didalam komunikasi ini tidak terwujud dengan maksimal. Kedua, pada sub aspek *clarity* telah berjalan dengan baik dikarenakan baik dari pihak sekolah dengan komite telah melakukan komunikasi yang jelas dengan masyarakat secara terukur yang dimana hal itu terlihat dari masyarakat khususnya koordinator kelas yang mewakili masyarakat yang telah memahami berbagai persoalan ataupun pengelolaan dana BOS dan tidak sedikit juga koordinator kelas yang mampu memberikan kontribusi baik saran atau kritik kepada pihak sekolah yang dinilai mampu mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah. Terakhir, aspek *consistency* dinilai masih belum optimal yang dimana hal itu terlihat dari tidak sedikitnya pelaporan BOS yang terhambat sehingga pembelajaran di sekolah atau pemenuhan kebutuhan sekolah ikut-ikutan terhambat, hal demikian terjadi karna aktivitas dari Bendahara yang padat atau ada kegiatan lainnya ditambah adanya kegiatan mengajar dan kegiatan diluar sekolah. Konsisten itu walaupun

komunikasi yang dijalankan dengan sesering mungkin namun harus mampu memberikan dampak yang baik juga didalam pengelolaan BOS itu sendiri.

- b. Sumber daya manusia belum kompeten dimana hal ini terlihat dari Bendahara Sekolah yang cukup sering terlambat dalam melakukan pelaporan dana BOS yang kemudian pengembangan pada pendidikan di sekolah khususnya sarana/prasarana yang terhambat, namun pada aspek SDM memiliki dampak positif sebab orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BOS secara langsung yakni Komite dengan pihak sekolah maupun koordinator kelas yang mumpuni dan memadai dalam memberikan kontribusi atau sumbangsinya dalam pengelolaan dana BOS di SDN Buaranjati 1. pada aspek anggaran operasional dana BOS belum berjalan dengan baik dikarenakan anggaran BOS ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah dikarenakan sekolah tidak jarang memerlukan anggaran atas kebutuhan yang mendesak dan diperlukan secepatnya demi pembelajaran dan kenyamanan siswa didik namun para siswa masih mampu mengembangkan kompetensi yang memberikan dampak baik bagi sekolah, sedangkan pada aspek fasilitas masih belum mumpuni terutama banyak media yang belum menunjang pada kebutuhan siswa atau sekolah termasuk lapangan sekolah, atau ruang kelas maupun sanitasi yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dikarenakan dana BOS ini tidak sepenuhnya mengcover kebutuhan seperti lapangan dan ruang kelas atau lainnya. Terakhir, dari sisi Otoritas atau kewenangan Pihak Sekolah maupun komite telah memahami tugas nya masing-masing dalam pengelolaan dana BOS ini.
- c. Aspek disposisi yakni komitmen dan tanggung jawab pihak sekolah dan komite sekolah dinilai baik dari sisi keduanya yang dimana hal itu terlihat menurutnya bahwa pengelolaan dana BOS demi kebaikan bersama dan kemaslahatan keseluruhan.
- d. Prosedur peraturan ini membahas terkait pengelolaan dana BOS serta mekanisme yang perlu dikerjakan oleh pihak sekolah, saat ini dari sisi prosedur pihak sekolah telah memahami peraturan terkait apa yang harus dilakukan didalam pengelolaan dana BOS yang telah diatur oleh Juknis BOS yang saat ini telah mudah diakses, namun dari tatanan hierarkinya walaupun pihak sekolah telah memahami apa yang dikerjakan dalam pengelolaan dana BOS, akan tetapi dari tatanan hierarki ini masih terkendala selanjutnya pihak sekolah memberikan saran dan masukkan kepada pemerintah pusat bahwasanya pengelolaan dana BOS di sekolah memerlukan orang yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi sehingga Bendahara Sekolah selaku operator yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dana BOS tidak lagi dirumitkan dalam administrasi BOS karena telah sibuk dalam kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas diluar.

2. Pembahasan

- a. Komunikasi harus mengedepankan aspek transmisi sebagai dasar keberhasilan didalam mewujudkan implementasi kebijakan yang baik dan terukur agar apa yang menjadi tujuan dan perencanaan dalam mengembangkan implementasi

kebijakan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kaidah-kaidah yang telah diatur.

Hal ini sesuai dengan pendapat George Edward III mengatakan bahwa komunikasi dalam transmisi ini menjadi suatu target yang dalam pengembangan di dunia pendidikan sebagai suatu sektor penting dalam membangun bangsa. Begitu juga dengan kejelasan (clarity) informasi dari pelaksana kebijakan yakni implementor yang dimaksud. Kejelasan didalam informasi ini dinilai sangat penting untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman orang-orang yang terlibat atau terdampak dalam kebijakan yang akan dilaksanakan dikarenakan dengan kejelasan informasi yang sesuai maka tidak sulit untuk menstimulus suatu kebijakan agar berhasil dan berada pada garis haluan dan ini perlu dilakukan dengan teratur dan terus menerus dengan memberikan kejelasan informasi juga akan memudahkan suatu koordinasi antar anggota sehingga apa yang akan dilaksanakan mudah diterima khususnya masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Hal ini sepadan dengan jurnal penelitian yang dilakukan Satrio et al (2023) yang berjudul “Pengelolaan SDM Dan Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Kemajuan Suatu Organisasi” bahwa kemajuan segala hal yang bentuknya organisasi atau perusahaan yang dimana dimaksud pada penelitian ini yaitu satuan pendidikan atau SDN Buaranjati 1 agar berjalan dengan optimal jika didukung dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas sebagai moda dasar atau utama didalam pengembangan organisasi tersebut. Hal tersebut tentunya sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek vital yang harus ada pada suatu sekolah dan didalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) itu harus dimanage dengan baik sebagaimana mestinya.

b. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia berguna sebagai penggerak implementor dari suatu pelaksana kebijakan yang dimana Komite, Kepala Sekolah, dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di SDN Buaranjati 1 harus mengembangkan aspek transparansi serta akuntabilitas guna apa yang dikelola pada anggaran dana bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan efektif bagi penerima. melalui hasil raport pendidikan dan standar kelulusan siswa yang mencapai angka terbaik. Pada anggaran dana BOS di SDN Buaranjati 1 tentunya tidak lepas juga dari kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai baik dan lebih *aware* dalam melihat kompetensi guru yang mengajar melalui monitoring observasi. Anggaran memainkan peran penting dalam membangun suatu kebijakan terkait pengelolaan dana BOS. Anggaran sebagai suatu yang sensitif, harus ada karna seperti diketahui anggaran ini mendukung pengelolaan lebih baik dan terstruktur agar apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu tersampaikan dan dapat dipenuhi sesuai pada Juknis Pengelolaan Dana BOS yang berlaku. Menurut George Edward III, implementasi kebijakan membutuhkan suatu yang dinamakan anggaran, anggaran memegang peranan penting didalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan kedepan. Hal ini menjadi sebab dasar

mengapa kebijakan itu tidak dapat berhasil dan mungkin saja karena anggarannya yang minim atau belum mencukupi. Sektor anggaran ini tidak hanya menjadi sebagai suatu dasar atau acuan yang harus ada pada implementasi kebijakan di pengelolaan dana BOS namun menjadi titik jelas sektor pendidikan mengenai pemenuhan kebutuhan bagi para siswa yang bertujuan dalam membangun pendidikan nasional berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

George Edward III, mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan dibutuhkan sarana/prasarana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, fasilitas tersebut yang dimaksud sangat vital juga dikarenakan sebagai penunjang pekerjaan dan pemenuhan pembelajaran pada pelaksanaan kebijakan sebagai peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga apa yang akan dilaksanakan ini efektif dan berguna bagi orang-orang atau implementor yang melaksanakan tugas tersebut.

Hal ini selaras dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al (2022) yang berjudul "Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang" bahwasanya pada hasil penelitiannya terkait sarana dan prasarana itu penting dan dasar dalam mengembangkan suatu tempat yang dimana dimaksud pada penelitian kali ini yakni SDN Buaranjati 1 penting dalam keberadaan sarana dan prasarana ataupun pemeliharannya harus tepat dilakukan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang diharapkan lebih mudah didapatkan dengan keberadaan sarana dan prasarana ini.

c. Disposisi

Menurut George Edward III, komitmen diartikan sebagai sebuah perasaan atau rasa kepedulian seseorang disuatu tempat ia bekerja yang membuat dirinya terus melakukan upaya bagaimana bertahan, terus bekerja keras semaksimal mungkin dan selalu berusaha memberikan kontribusi penuh demi tercapainya suatu tujuan dan pekerjaan khususnya implementasi kebijakan yang akan dilakukan harus didasari oleh tanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan melahirkan beberapa tindakan-tindakan positif dan menghindari beberapa sikap negatif maupun bentuk penyimpangan yang akan dilakukan oleh masing-masing individu.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George Edward III, prosedur ialah aturan yang mengatur dalam sebuah implementasi kebijakan yang merupakan sebagian kecil dari sebuah struktur birokrasi. Prosedur ini tidak hanya berbicara dengan aturan saja melainkan tentang beberapa garis haluan yang perlu dilakukan dan larangan-larangan terkait implementasi kebijakan sehingga orang-orang yang bekerja atau melaksanakan suatu kebijakan tidak keluar dari aturan yang dimana telah diatur oleh prosedur sehingga pekerjaan pun menjadi lebih teratur dan efektif, dan aspek birokrasi yang berhubungan dengan yang dimaksud struktur birokrasi ialah bagaimana sistem kerja dari hierarki itu sendiri berjalan yang dimana

tatanan hierarki ini berbicara tentang konsep tatanan kerja dari atas ke bawah atau mengenai otoritas yang memiliki kewenangan didalam implementasi kebijakan.

D. Kesimpulan

1. Transmisi atau saluran komunikasi masih belum optimal dikarenakan ada koordinasi yang terhambat dari sebagian masyarakat yang masih apatis dalam kegiatan atau partisipasi terhadap pengelolaan dana BOS,, sedangkan aspek *clarity* telah berjalan dengan baik, Dimana pihak sekolah dengan komite telah melakukan komunikasi yang jelas dengan masyarakat secara terukur terlihat dari Masyarakat, saran atau kritik kepada pihak sekolah yang dinilai mampu mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah, dan terakhir aspek *consistency* dinilai masih belum optimal yang dimana hal itu terlihat dari tidak sedikitnya pelaporan BOS yang terhambat sehingga pembelajaran di sekolah atau pemenuhan kebutuhan sekolah ikut-ikutan terhambat, hal demikian terjadi karna aktivitas dari Bendahara yang padat atau ada kegiatan lainnya ditambah adanya kegiatan mengajar dan kegiatan diluar sekolah. itu sendiri.
2. Sumber daya manusia belum kompeten dimana hal itni terlihat dari Bendahara Sekolah yang cukup sering terlambat dalam melakukan pelaporan dana BOS yang kemudian pengembangan pada pendidikan di sekolah khususnya sarana/prasarana yang terhambat, pada aspek anggaran operasional dana BOS belum berjalan dengan baik dikarenakan anggaran BOS ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah dikarenakan sekolah tidak jarang memerlukan anggaran atas kebutuhan yang mendesak dan diperlukan secepatnya demi pembelajaran dan kenyamanan siswa didik. hnya mengcover kebutuhan seperti lapangan dan ruang kelas atau lainnya. Terakhir, dari sisi Otoritas atau kewenangan Pihak Sekolah maupun komite telah memahami tugas nya masing-masing dalam pengelolaan dana BOS ini.
3. Aspek disposisi yakni komitmen dan tanggung jawab pihak sekolah dan komite sekolah dinilai baik dari sisi keduanya yang dimana hal itu terlihat menurutnya bahwa pengelolaan dana BOS demi kebaikan bersama dan kemaslahatan keseluruhan
4. Prosedur peraturan membahas terkait pengelolaan dana BOS serta mekanisme perlu dikerjakan oleh pihak sekolah, saat ini dari sisi prosedur pihak sekolah telah memahami peraturan terkait apa yang harus dilakukan didalam pengelolaan dana BOS yang telah diatur oleh Juknis BOS saat ini telah mudah diakses, namun dari tatanan hierarkinya walaupun pihak sekolah telah memahami apa yang dikerjakan dalam pengelolaan dana BOS, akan tetapi dari tatanan hierarki ini masih terkendala.

Referensi

Buku

Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat. *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1 No. 1.

- Alhasni, R. A., & Fitri Herawati, M. (2024). Buku Ajar Kebijakan Publik. In T. Media (Ed.), *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Pertama). Tahta Media Group.
- Ali, M., Luthfi, M., Oiwobo, M., & Nasor, M. (2023). PENDEKATAN MAX WEBER: BIROKRASI SERTA STRUKTUR KEKUASAAN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN MODERN. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2134.
- Anggraini, D. D., Hanani, R., & Suwitri, S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI KABUPATEN REMBANG. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*. <https://fisip.undip.ac.id>
- Ashfahani, S. (2019). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Implementasi Keterbukaan dan Dukungan dalam Komunikasi Antarpribadi (Studi Komunikasi Pimpinan dan Karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju)*. <http://journal.stikom-ima.ac.id/>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Ayu, N. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SIGLI-BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 9 (1).
- Baharuddin, A., & Riduwan, M. (2024). PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal Ta'limuna*, 2 (1).
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95-109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Elu, D., & Rahmawati, I. (2024). PENGELOLAAN DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEMAJUAN PERUSAHAAN. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4, Issue 1.
- Firmansyah M, S. D. R. I. (2024). Transformasi Pendidikan Melalui Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Untuk Literasi Digital Demi Pembangunan Berkelanjutan 2030. *MERDEKA, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 317-327.
- Hartawan, R., Kosasih, F., PGRI Metro Lampung, S., Bandung, U., & YAMISA Bandung, S. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348-1358. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Julaeha, S., & Pitriani, H. (2023). Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Pendanaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 227-232. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.199>
- Khafifah, M. (2024). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal Millia Islamia*, 3(1), 111-119.

- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Maulana, R., Asmawi, M., & Utami, P. (2022). Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Patriani, I. (2024). Tata kelola pemerintahan dinamis pada implementasi kebijakan inovasi pelayanan. *JPPI(Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 567-573.
- Siregar, W., Lubis, M. J., & Darwin, D. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Sekolah. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3867-3874. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2766>
- Statistik, B. P. (2023). *Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2020-2024*, Badan Pusat Statistik. Bps.Go.Id.
- Yanuard, Y., Samin, R., & Kurnianingsih Universitas Maritim Raja Ali Haji, F. (2024). Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah: Studi BAKESBANGPOL Prov. KEPRI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

Perundang-undangan

- Permendikbudristek No.32 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 (Juknis Pengelolaan BOS 2024)
- UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia